

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-64/PJ/2009
TENTANG : PEKERJA YANG MEMPEROLEH
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DITANGGUNG PEMERINTAH

"KOP SURAT"

Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jl.
.....

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor :

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009, dengan ini disampaikan bahwa kami :

Nama Perusahaan :
NPWP :

adalah perusahaan penyedia tenaga kerja (outsourcing) yang menempatkan pekerja kami pada :

No	Nama Perusahaan	NPWP	KLU	Jumlah pekerja yang ditempatkan	Nomor Kontrak Pekerjaan	Keterangan (Surat Pernyataan)
1.						Nomor :
2.						Nomor :
3.						Nomor :
4.						
...						
Jumlah						

Demikian kami sampaikan untuk memenuhi persyaratan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-64/PJ/2009 tentang Pekerja yang Memperoleh Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

Jakarta,

cap dan tanda tangan pengurus

Nama
NPWP

Lampiran :
Surat Pernyataan dari rekanan.

"KOP SURAT"

Yth Direktur PT
Jl.
.....

SURAT PERNYATAAN
Nomor :

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009, dengan ini menyatakan bahwa kami :

Nama Perusahaan :
NPWP :

adalah perusahaan yang berusaha pada kategori usaha dengan KLU yang mempekerjakan pekerja dari perusahaan penyedia tenaga kerja (outsourcing) :

Nama Perusahaan :
NPWP :
Nomor Kontrak :
Tanggal Kontrak :

dengan rincian :

No	Nama Pekerja	NPWP	Penghasilan yang dibayarkan
			Rp
			Rp
			Rp
			Rp
			Rp
			Rp
Jumlah			Rp

Demikian kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-64/PJ/2009 tentang Pekerja yang Memperoleh Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

Jakarta,

cap dan tanda tangan pengurus

Nama
NPWP

"KOP SURAT"

Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jl.
.....

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor :

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009, dengan ini menyatakan bahwa kami :

Nama Perusahaan :
NPWP :
KLU :

adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pekerjaan pengolahan barang berdasarkan pesanan (maklon) dengan gambaran umum kegiatan pekerjaan sebaga berikut :

Nomor Kontrak Pekerjaan Maklon	Nama dan NPWP Perusahaan Pemilik Barang	Gambaran Umum Pekerjaan yang Dilakukan

Demikian kami sampaikan untuk memenuhi persyaratan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-64/PJ/2009 tentang Pekerja yang Memperoleh Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

Jakarta,

cap dan tanda tangan pengurus

Nama
NPWP

Lampiran :
Fotokopi kontrak pekerjaan maklon.

"KOP SURAT"

LAPORAN HASIL PENELITIAN
Nomor :

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-64/PJ/2009 tentang Pekerja yang Memperoleh Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan diketahui bahwa :

Nama Perusahaan :
NPWP :
KLU :
Nomor Surat Pernyataan :

adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pekerjaan pengolahan barang berdasarkan pesanan (maklon) dengan gambaran umum kegiatan pekerjaan sebagai berikut :

Nomor Kontrak Pekerjaan Maklon	Gambaran Umum Pekerjaan yang Dilakukan

Menyetujui,

Kepala Kantor

Mengetahui,
Kasi Pengawasan dan
Konsultasi...

Peneliti,
AR

.....
NIP.

.....
NIP.

NIP.